DINAMIKA BUDAYA ISLAM DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU BAGIAN SELATAN

Wuri Handoko*

Abstrak

Ternate and Tidore Islamic Kingdom come up as two most dominant kingdom and most intensive do expansion, even regional to till defect especially in region Archipelago of Moluccas part of south. History accompanied by archaeological facts prove that spreading of Islam in region archipelago of Moluccas part of south as in Island of Ambon, Haruku, Saparua, even horrible Till East and of Raja Amapat Island, Papua come from two empire of Islam in North Moluccas. How in fact Islamic culture take place, how cultural characteristic of uppermost Islam is discussion focus of this study. This study represent result of research of Islam situs-situs either through direct observation and also book study. This study nor only data interpretation of arkeolog existing i, but elaborating also history and is saleable of culture live with Islamic showing pattern of different with other area. Archaeological evidence, can explain power rivalry but pursuant to cultural characteristic of Islam that goes on show the existence of elements dynamics of not Islamic

Keyword : Dynamics, Power, Tradition, Islam.

Pendahuluan

Dunia Keislaman di Wilayah Kepualuan Maluku, mula-mula berkembang di wilayah utara yang ditandai dengan berdiri dan berkembangnya kerajaan – kerajaan besar bercorak Islam. Di wilayah ini berkembang empat kerajaan Islam yang disebut sebagai Moluko Kie Raha, yakni Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Dalam historiografi Islam di wilayah Kepualuan Maluku, eksistensi Islam yang paling mapan dianggap berpusat di wilayah-wilayah empat kerajaan besar di wilayah Maluku Utara itu, sementara di daerah lainnya di bagian selatan Kepulauan Maluku atau yang saat ini termasuk dalam wilayah administratif Propinsi Maluku, merupakan daerah-daerah perluasan kekuasaan dan penyebaran Islam yang informasinya kurang terangkat. Mungkin Kerajaan Hitu di Pulau Ambon, satu-satunya pengecualian, mengingat sejarah mencatat kerajaan ini

sezaman dan setaraf dengan kerajaan Ternate, meskipun pengaruh kerajaan ini tidak sebesar wilayah pusat peradaban Islam lainnya di wilayah Maluku Utara. Dapat dipahami, kurang berkembangnya daerah-daerah penyebaran Islam di wilayah bagian selatan Kepulauan Maluku, disebabkan pula oleh kuatnya pengaruh kolonial yang menghegemoni wilayah itu baik secara politis maupun kultural.

Menyebut wilayah Kepulauan Maluku bagian selatan dalam tulisan ini adalah menyangkut wilayah pulau-pulau yang secara administratif berada di wilayah Propinsi Maluku. Di wilayah ini pada masa lalu terkenal dengan beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Hitu di Pulau Ambon, Kerajaan Hoamoal di Pulau Seram, Kerajaan Iha dan Honimoa di Pulau Saparua, dan beberapa wilayah lainnya yang saat ini merupakan daerah pedesaan yang bercorak Islam, seperti di desa Rohomoni, Pelaw, Kailolo di Pulau Haruku. Dalam tulisan ini akan diangkat perihal dunia keislaman di wilayah Jazirah Leihitu yang merupakan wilayah Kerajaan Hitu pada masa lampau, selain itu juga akan digambarkan keislaman di wilayah desa Siri Sori Islam atau yang pada masa lampau dikenal sebagai Kerajaan Honimoa di Pulau Saparua, kemudian juga di desa Rohomoni yang mewakili Islam di Pulau Haruku serta wilayah lainnya. Sehingga lokus kajian ini pada dasarnya didominasi yang secara administratif berada di wilayah Maluku Tengah, yang sering dianggap, sebagai wilayah yang mewakili pembentukan kerajaan-kerajaan Islam selain di wilayah Maluku Utara. Meskipun kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Maluku bagian selatan, budaya masyarakat dengan corak Islam cukup berkembang, namun perkembangannya menjadi daerah kesultanan seperti halnya di wilayah Maluku Utara tidak terwujud dan ketika pada masa hegemoni kolonial kerajaan-kerajaan ini mengalami kemunduran dan kalah dalam peperangan dan politik (Putuhena, 2001:58).

Daerah – daerah yang disebutkan di atas sebagai lokasi desa-desa saat ini yang bercorak Islam, pada masa kini merupakan desa-desa yang sangat dekat berdampingan harmonis dengan desa-desa Kristen, kecuali bekas wilayah Kerajaan Hitu yang saat ini merupakan desa-desa di wilayah Kecamatan Leihitu yang seluruhnya merupakan desa Islam. Berbeda dengan wilayah Kerajaan Hitu yang cukup luas pada masa lampau, desa-desa lainnya merupakan kerajaan berskala kecil atau yang diistilahkan sebagai negeri atau saat ini setingkat desa. Kerajaan Hitu sendiri saat ini

merupakan wilayah-wilayah desa yang secara administratif merupakan wilayah dari kecamatan Leihitu, merupakan desa-desa yang secara keseluruhan merupakan desa bercorak keagamaan Islam.

Makalah ini mencoba menguraikan bagaimana budaya dan keagamaan Islam berlangsung dan berkembang di wilayah Maluku bagian selatan, yang sebagaimana tercatat dalam sejarah merupakan wilayah atau daerah persebaran Islam sekaligus daerah pelebaran sayap kekuasaan dari Kerajaan Islam di Maluku Utara, terutama Ternate dan Tidore. Apakah terdapat perbedaan dalam perkembangan Islam antara wilayah kekuasaan dibanding dengan wilayah pusat kekuasaan Islam, adalah juga bagian penjelasan yang coba didiskusikan dalam makalah ini. Selanjutnya juga akan diuraikan bagaimana pengaruh kekuasaan dan terutama persaingan antara kerajaan-kerajaan Islam, dipertajam lagi oleh hadirnya hegemoni kolonial terhadap keberlangsungan budaya Islam. Disamping itu juga akan disodorkan bukti-bukti arkeologis yang dapat menggambarkan bagaimana budaya Islam menjadi simbol ikatan integrasi yang menyatukan kekuatan-keuatan pemerintahan otonom dalam satu kesatuan politik dan kultural diantara beberapa kerajaan kecil atau negeri Islam.

Islamisasi, Ekspansi Kekuasaan dan Rivalitas

Sejarah mencatat di wilayah Maluku-Maluku Utara, agenda perluasan agama Islam dari wilayah-wilayah pusat kekuasaan Islam ke wilayah-wilayah lainnya baik dalam lingkup geografi daratan yang sama maupun ke wilayah lain di seberang lautan, berjalan seiring agenda ekspansi kekuasaan. Artinya, Islam disebarluaskan oleh kerajaan-kerajaan pusat seiring berjalannya agenda perluasan kekuasaan. Dengan demikian, setiap kali ekspansi kekuasaan dilakukan, pada saat itu pula Islam diperkenalkan di daerah-daerah kekuasaan yang didudukinya. Di Maluku Utara, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo adalah wilayah-wilayah pusat Kerajaan Islam yang pengaruhnya menyebar ke seluruh wilayah Kepulauan Maluku, bahkan hingga ke sebelah barat dan timurnya. Di bagian selatan Maluku, Kerajaan Hitu di Pulau Ambon dianggap sebagai pusat kekuasaan Islam. Dari sini, penyebaran Islam ke wilayah pulau lainnya juga berjalan. Perkembangan lanjut, Ternate dan Tidore bersaing memperoleh legitimasi politik sebagai wilayah pusat kekuasaan Islam, sehingga masing-masing kerajaan tersebut bersaing untuk melebarkan sayap kekuasaannya. Ternate

berekspansi ke wilayah Seram Barat yakni jazirah Hoamoal, di situ terdapat Kerajaan Hoamoal dan ke wilayah Pulau Ambon, sementara Tidore berkespansi ke wilayah pesisir utara Pulau Seram, Kepulauan Gorom dan Seram Laut di bagian timur pulau Seram, bahkan mencapai kepulauan Raja Empa, Irian. Peranan Ternate dan Tidore sebagai bandar jalur sutera dengan sendirinya terkait dengan ekspansi itu (Leirizza, 1979). Seiring dengan itu, perluasan agama Islam dari kedua kerajaan tersebut juga berjalan. Dengan demikian, selain persaingan dalam hal kekuasaan, maka penyebaran Islamlah dilakukan dengan semangat persaingan. Hal ini karena setiap wilayah yang berhasil diislamkan, secara politis akan mengakui pula kekuasaan kedua kerajaan tersebut.

Banyak penulisan sejarah Maluku berisi pula berbagai penjelasan menyangkut sejarah penyebaran Islam di wilayah ini. Banyak kajian menjelaskan tentang sejarah islamisasi di wilayah Maluku meliputi, proses penyebaran Islam, negara penyebar, proses penerimaan hingga perkembangannya. Meski demikian, hingga saat ini, teori tentang jalur Islamisasi di Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku dan Maluku Utara) masih terus dalam proses kajian. Beberapa pendapat yang mengemukakan teori masuknya Islam di wilayah ini diantaranya oleh Mailoa (1977), bahwa Islam berkembang di Maluku Utara diduga berasal dari Malaka, Kalimantan, atau Jawa. Prodjokusumo (1991), mengemukakan bahwa Banjar dan Giri atau Gresik cukup besar pengaruhnya dalam sosialisasi Islam di Maluku Utara, sebelum terjadi arus balik, yakni penyebaran Islam dari Maluku ke arah barat yakni Buton dan daerah lain di Sulawesi Selatan (Mailoa dan Prodjokusumo dalam Ambary; 1998: 153). Meski demikian, penting dicatat, Islam dianggap telah masuk ke Maluku Utara pada pungkasan abad ke-14, seperti yang terkandung dalam tradisi lisan yang menyebutkan bahwa Raja Ternate ke-XII akrab dengan para pedagang Arab. Berdasarkan hal tersebut Ambary (1998), mengemukakan kemungkinan lain bahwa Islam masuk melalui jalan Cina Selatan dan tidak melalui Selat Malaka.

Merangkum berbagai pendapat, Marasabessy (2001), mengemukakan bahwa Islam masuk ke Maluku Utara melalui berbagai tahap, yaitu:

1. Periode Awal, periode ini dimulai pada abad ke-7 Masehi yaitu masa perdagangan orang-orang Arab untuk membeli rempah-rempah.

2. Periode Pertengahan, periode ini dimulai pada abad ke-11 yang ditandai dengan munculnya nama-nama Arab, yang diduga keras karena pengaruh ajaran Islam, seperti Sultan Mansyur Malamo (1257-1277) yang nama aslinya adalah Cico Bunga yang menjadi Raja Ternate.
3. Periode Penerimaan Islam oleh Kesultanan, periode ini ditandai dengan diterimanya Islam oleh pihak Kerajaan yang sekaligus berganti nama menjadi Kesultanan. Periode ini dimulai pada tahun 1495, dimana Sultan Zainal Abidin (Sultan ke-19) memperdalam ilmu agama ke tanah Jawa (Marasabessy, 2001: 73-74).

Kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan di Maluku Utara, dianggap sebagai pusat kekuasaan Islam, karena di wilayah inilah Islam pertama kali berkembang. Di wilayah Pulau Ambon, Maluku, Kerajaan Hitu juga dianggap sebagai pusat peradaban dan kekuasaan Islam. Hitu menerima Islam sezaman dengan Ternate, meskipun sebagian dari catatan sejarah menuliskan bahwa Hitu sendiri dianggap sebagai wilayah kekuasaan dari Ternate. Jika kehadiran Islam dianggap sebagai kekuatan transformatif, telah memberdayakan masyarakat nusantara untuk keluar dari paham-paham primitif, serta dianggap mampu memberikan andil terhadap perubahan penting di bidang sosial dan struktur politik (lihat Mahmud, 2001:73), maka di wilayah Maluku, wilayah-wilayah pusat kekuasaan Islam seperti yang disebutkan diawal, dapat dikatakan mewakili anggapan tersebut. Pusat-pusat kekuasaan Islam Maluku itu telah berkembang menjadi daerah kesultanan yang melebarkan sayap kekuasaannya hingga ke 'wilayah-wilayah seberang'. Sejarah mencatat, Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan di wilayah Maluku Utara yang dapat dipresentasikan sebagai wilayah pusat kekuasaan Islam di wilayah Maluku Utara. Ternate, melebarkan sayap ke wilayah selatan Maluku, meliputi Pulau Ambon, Haruku, Saparua, Buru, Seram Bagian Barat dan Tengah. Sementara itu Tidore melebarkan sayap kekuasaannya ke wilayah pesisir utara Pulau Seram dan wilayah kepulauan di sisi paling timur Pulau Seram, yakni Gorom dan Seram Laut hingga ke wilayah Kepulauan Raja Ampat Irian Jaya (Leirissa, 2001:8). Dapat dianggap kedua wilayah kesultanan itu saling bersaing melebarkan sayap kekuasaannya hingga keluar wilayah geografisnya ke wilayah pulau-pulau disebelah lautan.

Selain pelebaran sayap kekuasaan yang bertendensi politis, kerajaan-kerajaan besar tersebut juga menyebarkan dan mengembangkan

paham-paham bertendensi kultural. Salah satunya adalah penyebaran dan pengembangan agama Islam di wilayah-wilayah pelebaran kekuasaan tersebut. Pengislaman 'wilayah seberang' kesultanan Ternate, tidak lepas dari peranan pusat kekuasaan itu sendiri (Putuhena, 2001:62). Oleh karena itu bagian selatan kepulauan Maluku, meliputi Pulau Ambon, Haruku, Saparua, Seram dan pulau-pula lainnya, keagamaan Islam menyebar dan berkembang berasal dari wilayah kerajaan-kerajaan mapan di Maluku Utara, terutama Ternate dan Tidore. Dalam hal ini Hitu di Pulau Ambon adalah sebuah pengecualian, karena perkembangan Islam di Hitu sezaman dengan Ternate, bahkan sejarah mencatat raja Hitu bersama Sultan I Ternate, yakni Zaenal Abidin belajar Islam pada waktu bersamaan di Gresik. Justru, dari pertemuan itu kata Schrieke (1960) keduanya membangun relasi politik antara Hitu dan Ternate dalam suatu ikatan perjanjian yang mungkin sekali juga tentang penyebaran agama Islam di wilayah masing-masing (lihat Putuhena, 2001:64-65).

Oleh karena agenda Islamisasi berjalan seiring proses ekspansi kekuasaan, maka sudah tentu, wilayah-wilayah seberang dibawah pusat kekuasaan Islam Maluku Utara, tidak seluruhnya menerima pemahaman tentang Islam secara utuh. Kadang, pemahaman tentang Islam, justru berkembang belakangan pada pasca periode Islam, akibat kontak relasi dengan orang luar yang semakin luas di waktu-waktu belakangan. Meski demikian dalam prosesnya Islam dengan mudah diterima masyarakat lokal, karena sifat adaptasinya yang tinggi terhadap budaya lokal. Oleh karena proses pengislaman yang kadangkala tidak intensif dan tidak benar-benar fokus, selain karena sifat adaptasinya dengan budaya lokal, maka seringkali pemahaman Islam di wilayah seberang bercampur baur dan tumpang tindih dengan tradisi lokal yang bahkan terus dihidupkan. Kemungkinan inilah salah satu alasan atau jawaban atas pertanyaan (lihat Mahmud, 2001:83) adanya bukti-bukti arkeologis yang mengandung soal apakah masyarakat pendukungnya saat itu belum tersentuh gagasan etis berdimensi tauhid Islam atau disebabkan lemahnya determinasi budaya Islami. Proses pengislaman wilayah-wilayah seberang di wilayah Kepulauan Maluku-Maluku Utara tidak selalu berjalan mulus atau benar-benar fokus pada satu agenda penyebaran Islam. Biasanya selain karena ekspansi politik, penyebaran Islam dibarengi pula oleh agenda-agenda perluasan perdagangan akibat persaingan kerajaan untuk menguasai jaringan

ekonomi. Dalam hal ini kemungkinan pula terjadinya perang akibat persaingan itu, ditambah persaingan dengan masuknya bangsa Eropa masa kemudian. Tidak fokusnya agenda pengislaman, sehingga proses Islamisasi kadang kala tidak berjalan intensif. Kemungkinan, proses yang terjadi adalah introduksi sambil lalu, atau kemungkinan lain, justru penguasa setempat diislamkan ditempat lain atau diluar wilayah setempat. Sebagai contoh misalnya masuknya Islam di Banda menurut tradisi lisan setempat menyatakan bahwa agama Islam diterima oleh orang-orang Banda di suatu tempat diluar Banda, jadi bukan orang Islam datang ke Banda. Pada waktu itu Banda memiliki armada niaga untuk mengangkut pala dan fuli ke daerah pelabuhan lain. Banda telah menjadi eksportir pala terbesar di Nusantara (Roelofs, 1962:97).

Jika di wilayah pusat kekuasaan Maluku-Maluku Utara, Islam mula-mula disebarkan oleh para penyebar Islam yang datang dari wilayah sumber agama tersebut atau berasal dari pusat-pusat peradaban Islam Nusantara, maka di wilayah-wilayah seberang pada umumnya disebarkan para mubaligh Islam dari pusat kekuasaan yang tak jarang hanya karena *membonceng* proses ekspansi kekuasaan dan perluasan jaringan perdagangan (ekonomi). Maka, kemungkinan keagamaan Islam memiliki perbedaan karakter antara wilayah-wilayah pusat kekuasaan dengan wilayah seberang sebagai daerah perluasan kekuasaan. Hal ini semakin tajam, ketika hegemoni kekuasaan kolonial semakin kuat, yang sangat berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat baik secara sosial, politik maupun kultur. Di daerah-daerah perluasan kekuasaan Islam Ternate dan Tidore, kemapanan Islam secara politis dibayangi oleh hegemoni kekuasaan kolonial yang semakin kuat, sehingga secara kultur juga berpengaruh pada perkembangan budaya Islam.

Di wilayah Maluku-Maluku Utara, atau mungkin daerah lainnya di Nusantara, agenda Islamisasi tampaknya tak bisa dilepaskan dari proses ekspansi atau perluasan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan pemegang kendali pusat pemerintahan Islam. Dimana Islam disebarkan, disitu pula perluasan kekuasaan ditanamkan. Di wilayah Maluku-Maluku Utara, eskalasi politik seperti ini lebih tajam dibandingkan daerah lain mengingat wilayah Maluku banyak berdiam kerajaan-kerajaan Islam yang besar, geografis yang relatif berdekatan dengan sumberdaya yang melimpah ruah. Hegemoni politik dan ekonomi diperebutkan untuk memperoleh pengakuan sebagai kerajaan

pusat pengendali. Persaingan demi persaingan berjalan untuk mendapatkan pengakuan sebagai kerajaan yang paling berpengaruh di seluruh kepulauan Maluku.

Oleh karena kemungkinan agenda perluasan kekuasaan lebih dominan, sehingga agenda pengislaman wilayah bisa jadi sebagai agenda nomor dua atau agenda turutan. Tak bisa dipungkiri jika kemudian dikatakan agenda Islamisasi membonceng proses ekspansi kekuasaan. Implikasi hal itu, kemungkinan akan ditemui karakteristik budaya Islam yang berbeda antara wilayah seberang sebagai daerah kekuasaan dengan wilayah pusat kekuasaan Islam. Akibat agenda Islam yang tidak benar-benar fokus, diselingi pula berbagai bentuk persaingan dalam perebutan wilayah, maka kemungkinan bisa terjadi jika penerimaan Islam di daerah penyebarannya, tidak benar-benar utuh. Inipun mungkin bisa menjadi jawaban, ketika banyak disimpulkan oleh banyak arkeolog, Islam terkadang tumpang tindih dengan tradisi lokal yang kental dengan budaya megalitik. Tampaknya, di wilayah Maluku-Maluku Utara soal persaingan dan ekspansi kekuasaan yang seiring dengan agenda Islamisasi, dipertajam lagi dengan adanya persaingan pada masa hegemoni kolonial menjadi salah satu faktor munculnya karakteristik atau determinasi Islam yang berbeda antara pusat dan wilayah seberang.

Islam dan Ikatan Integrasi

Beberapa catatan sejarah menyebutkan, di wilayah Maluku, Islam hadir karena penyebaran yang berasal dari Ternate. Jaffaar (2006) menuliskan, Islam adalah salah satu faktor ikatan integrasi, oleh karena itu daerah-daerah yang telah menerima Islam, seperti Hoamoal (Seram Barat), Saparua, Haruku dan sebagainya, menempatkan dirinya sebagai daerah kekuasaan, bagian dari kesultanan Ternate (Jaffaar, 2006:55). Dapat disimpulkan kehadiran Islam di beberapa daerah di bagian selatan Kepulauan Maluku atau daerah Propinsi Maluku tak dapat dilepaskan dari gerakan Islamisasi dan ekspansi kekuasaan oleh Kesultanan Ternate. Meski demikian, Islam terbukti telah menjadi salah satu faktor ikatan integrasi, oleh karena itu daerah-daerah yang telah menerima Islam, menempatkan dirinya sebagai daerah kekuasaan, bagian dari kesultanan Ternate.

Islam, sebagai agama maupun kultur merupakan media ikatan integrasi, terbukti telah menyatukan berbagai negeri dalam satu ikatan kekuasaan politik dan kultural. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, wilayah-wilayah yang menerima Islam, secara otomatis juga mengakui kekuasaan kerajaan besar penyebar Islam. Daerah-daerah di wilayah bagian selatan Kepulauan Maluku baik sebagai kerajaan maupun negeri menyatakan menerima Islam sekaligus menempatkan dirinya sebagai daerah kekuasaan bagian dari kekuasaan Kerajaan Ternate ataupun Tidore. Dapat dijelaskan pula, daerah-daerah Islam di bawah kekuasaan kerajaan Hitu di Pulau Ambon, merupakan negeri-negeri Islam yang memiliki pemerintahan adat sendiri, namun mengakui Hitu sebagai kerajaan Islam yang merupakan induk dari wilayah Islam lainnya di jazirah Leihitu Pulau Ambon, bahkan pengaruhnya kemungkinan juga menyebar ke wilayah pulau-pulau lainnya.

Di Hitu, terdapat peninggalan mesjid Kuno yang tinggal puing-puing pondasi saja, dinamakan mesjid Tujuh Pangkat. Menurut Hikayat Tanah Hitu penamaan mesjid tujuh pangkat diberikan oleh Empat Perdana Hitu berdasarkan tujuh negeri yang menjadi wilayah Hitu pada masa itu. Penyebutan mesjid Tujuh Pangkat ini juga secara arkeologis dibuktikan dengan tujuh susunan batu yang sisa-sisanya masih ada (Handoko, 2006; Sahuwisalane: 1996). Di Pulau Haruku, terdapat persekutuan 5 (lima) negeri atau desa Islam yakni Negeri Pelauw, Kailolo, Kabauw, Hulaliu dan Rohomoni yang disebut sebagai Amarima Hatuhaha, masing-masing juga memiliki pemerintahan otonom, namun menyatukan diri dalam persekutuan negeri-negeri Islam yang disebut Amarima Hatuhaha yang berpusat di desa Rohomoni (Ambo, dkk: 2009, Sudarmika 2007). Dari kelima negeri itu, hanya Hulaliu yang saat ini merupakan desa Kristen.

Bukti arkeologis menyatunya kekerabatan Amarima Hatuhaha ini yakni dengan dibangunnya mesjid kuno yang dinamai Masjid Uli Hatuhaha. Demikian juga di Kepulauan Gorom, sebagai wilayah penyebaran Islam yang berasal dari Kerajaan Tidore. Di wilayah ini terdapat 3 (tiga) negeri atau kerajaan kecil yang berpemerintahan otonom namun menyatakan diri sebagai wilayah dari persekutuan 3 (tiga) wilayah negeri sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan yakni Negeri Kataloka, Ondor, dan Amar Sekaru yang merupakan negeri-negeri adat bercorak Islam. Ketiga wilayah kerajaan kecil itu, menerima Islam dan mengakui sebagai bagian dari

kekuasaan Kerajaan Tidore (Handoko, 2007). Demikian pula di Pulau Saparua, terdapat Kerajaan Islam Iha, yang juga merupakan gabungan negeri-negeri sebagai satu kesatuan politik dan budaya.

Dengan demikian, penerimaan keagamaan Islam secara resmi oleh pemerintah dalam hal ini kerajaan ataupun negeri telah menandai bersatunya beberapa pemerintahan otonom dalam persekutuan pemerintahan yang secara politis mengakui adanya satu wilayah tertentu sebagai induk atau pusat pemerintahan.

Budaya Islam Dan Perkembangannya

Beberapa tinggalan arkeologi yang dapat ditemui hingga sekarang juga dapat memberi gambaran, betapa budaya Islam dari awal hadirnya hingga perkembangannya saat ini sangat dinamis. Seperti yang telah dijelaskan di awal pula, kemungkinan dapat ditemui berbagai perbedaan karaktersitik Islam antara daerah-daerah perluasan kekuasaan dengan daerah-daerah pusat Islam yang dapat dianggap mewakili kemapanan Islam dalam hal kekuasaan, politis maupun secara kultural.

Secara arkeologis bukti-bukti kemapanan Islam dapat ditelusuri di wilayah bekas Kerajaan Hitu. Dapat dikatakan pada wilayah bagian selatan kepulauan Maluku, kerajaan Hitu adalah sebuah wilayah dengan keagamaan dan budaya Islam yang paling kuat dan paling mapan. Daerah ini selama ini memang dianggap sebagai wilayah kerajaan Islam di Pulau Ambon yang kekuasaan dan keislamannya sejajar dengan Ternate. Di wilayah ini ditemukan bekas Masjid Kuno Tujuh Pangkat, yang dibangun diatas bukit bernama Amahitu. Selain bekas mesjid kuno ditemukan juga naskah alquran kuno dan naskah kuno lainnya, pucuk mustaka mesjid kuno, mahkota raja, kompleks makam raja, penanggalan Islam kuno, timbangan zakat fitrah dan lain-lain (Handoko, 2006; Sahuwilawane 1996).

Dari data arkeologi ini dapat menggambarkan bahwa kerajaan Hitu merupakan wilayah kerajaan dengan corak budaya Islam yang kuat. Sejauh ini tidak ditemui bukti-bukti baik secara arkeologis maupun laku budaya hidup yang menunjukkan budaya Islam bercampur baur dengan budaya non Islami. Dengan kata lain, setidaknya budaya Islam yang berkembang di wilayah Hitu, sejauh ini tidak menunjukkan perbedaan yang menyolok dengan daerah pusat penyebaran Islam lainnya. Laku budaya yang ada juga lazim ditemui di daerah lain, misalnya tradisi berziarah ke makam

para Raja Hitu, merupakan kegiatan yang lazim sebagaimana daerah lainnya seperti tradisi ziarah ke makam para wali di Jawa. Selain itu di desa Kaitetu, yang pada masa kerajaan merupakan salah satu daerah kekuasaan Hitu, sampai sekarang masih berdiri kokoh Masjid Tua Keitetu yang konon dibangun pada tahun 1414 M. Selain itu juga tersimpan naskah alquran kuno, kitab barzanji, naskah penanggalan kuno dan sebagainya. Bukti-bukti arkeologis ini menunjukkan kemapanan Islam di wilayah tersebut.

Dapat dilihat bahwa penyebaran Islam di wilayah ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti dalam hal dakwah. Di wilayah Kerajaan Hitu misalnya, sangat mungkin naskah alquran kuno merupakan bukti atau untuk media sosialisasi Islam (Handoko, 2006), begitu juga kitab barzanji, naskah hukum Islam dan penanggalan Islam kuno. Data arkeologi ini dapat mewakili gambaran kebudayaan Islam di wilayah pusat-pusat peradaban Islam yang mapan keIslamannya, seperti halnya di wilayah Maluku Utara yang diwakili terutama kerajaan Islam Ternate dan Tidore.

Bagaimana dinamika Islam di daerah lainnya? Beberapa data yang diuraikan berikut, mungkin dapat menjadi bahan perbandingan bagaimana dinamika budaya Islam berlangsung di beberapa wilayah bagian selatan Kepulauan Maluku ini serta dapat mengenali karaktersitik yang mungkin dapat dibedakan dengan wilayah pusat persebaran dan peradaban Islam.

Di Pulau Saparua, berdasarkan penelitian arkeologi terdapat desa atau negeri bernama Siri Sori Islam atau yang dulu disebut sebagai kerajaan Honimoa, kerajaan islam berskala kecil namun memiliki pengaruh cukup kuat di Pulau Saparua disamping Kerajaan Iha yang lebih kesohor. Negeri Siri Sori Islam adalah negeri bercorak Islam, namun kental dengan tradisi lokal yang masih terus berlangsung. Bukti-bukti arkeologis di wilayah Kerajaan Siri Sori Islam, Pulau Saparua memperlihatkan bahwa Islam pada awal masuknya tidak mampu melepaskan diri dari dominasi tradisi lokal yang cenderung megalitis. Bahkan dominasi unsur megalitik sangat kuat dan terus bertahan hingga persentuhan masyarakat lebih intensif dengan dunia luar ketika permukiman pindah dari pedalaman (negeri lama di perbukitan) ke permukiman baru di pesisir pantai. Tipologi makam dan nisan baik yang ditemukan di negeri lama di puncak bukit, maupun di pesisir pantai menunjukkan unsur tradisi megalitik yang berlanjut (Handoko, 2008). Masyarakat Negeri (Desa) Iha dan Siri Sori Islam, yang

kini dikenal sebagai masyarakat yang menganut Islam sebagai paham keagamaan, adalah masyarakat lokal Maluku yang tumbuh melalui berbagai pengalaman sejarah dan budaya. Jauh sebelum Islam berkembang dan kini hidup sebagai sebuah agama yang dianut, masyarakat Siri Sori Islam, seperti juga pada umumnya masyarakat Maluku adalah masyarakat penganut kepercayaan animisme dan dinamisme yang sangat kental dengan media megalitik. Kontinuitas unsur tradisi Pra Islam sangat tampak dari tipe nisan dan makam baik di negeri lama atau di desa Siri Sori Islam sekarang. Fenomena ini menurut Mahmud (2001:79) menunjukkan intervensi budaya dari luar betapun menjanjikannya tidak mentah-mentah diterima. Menurut ST Alisyahbana, setiap persentuhan dan interaksi suatu masyarakat dengan kebudayaan baru, selalu ada upaya kritis terhadap benda dan kejadian disekitarnya untuk memilih isi budayanya (Koestoro, 1981:7; *ibid*). Pada kasus situs makam kuno Siri Sori Islam, kecenderungan unsur megalitis masih sangat dominan tampak pada bentuk makamnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya makam naturalis namun tampak terlihat membentuk undakan. Pembuatan makam juga dibuat diatas bukit batu, selain itu bentuk nisan yang menyerupai menhir berukuran kecil, menunjukkan adanya perkembangan lokal dari fungsi menhir. Diperkuat lagi misalnya keberadaan makam kuno Islam dan makam non Islam orientasi timur barat berasosisia dengan beberapa dolmen dalam satu lokasi (Handoko, 2008).

Bagaimanapun kuatnya konsep megalitik dalam nafas budaya Islam yang dipahami oleh masyarakat Siri Sori Islam, namun secara politis legitimasi Islam dalam konstitusi pemerintahan juga kuat. Istana, sebagai simbol penguasa dibawah hegemoni kekuasaan Kolonial tetap mengakui konsep Islam dalam konstitusi pemerintahan yang telah lama dianut sebelumnya. Kemungkinannya bahkan, untuk menghindari resistensi masyarakat terhadap kekuasaan Kolonial, tampak sekali pihak kolonial membuka ruang yang lebar untuk hidupnya konstitusi dibawah payung Islam. Data arkeologis berupa naskah tua bertuliskan huruf Arab yang isinya tentang data kependudukan warga Siri Sori Islam serta berbagai surat perjanjian, merupakan contoh kecil atau bentuk penerapan aturan dalam bingkai budaya Islami yang terus dipegang. Ini dapat menjadi gambaran, bagaimanapun negatifnya beberapa unsur budaya yang membentuk konstruksi Islam yang dianut masyarakat Siri Sori Islam,

namun terbukti Islam tetap dipegang sebagai pedoman yang bahkan menjadi legitimasi sebuah pemerintahan, bagaimanapun kuatnya pengaruh kolonial menyeruak ke bidang-bidang kehidupan lainnya.

Selanjutnya di Pulau Haruku, pada masa lalu terdapat persekutuan negeri terdiri dari 5 (lima) negeri Islam yakni Negeri Pulauw, Kailolo, Kabauw, Hulaliu dan Rohomoni yang disebut sebagai Amarima Hatuhaha, dengan negeri induk atau pusat pemerintahan berada di Negeri Rohomoni. Di Negeri Rohomoni terdapat masjid kuno, yang dari segi bentuk tidak banyak berbeda dengan wilayah lainnya, antara lain dengan ciri khas atap tumpang berjumlah 3 (tiga) susun dan adanya mustaka yang tidak berbeda dengan masjid lainnya di wilayah Kepulauan Maluku. Satu hal yang membedakannya adalah banyaknya terdapat ornamen hiasan berupa ukir-ukiran di beberapa sisi luar masjid yakni pada sekeliling dinding luar masjid bagian atas, baik pada bangunan utama maupun bangunan pintu masuk. Pada salah satu tiang juga terdapat ukiran berbentuk naga yang distilir, menurut tradisi setempat menyimbolkan kemakmuran. Tentu saja data arkeologis ini menarik untuk pengkajian lebih dalam apakah terdapat pengaruh teknologi pertukangan yang datang dari wilayah luar yang identik dengan motif naga, misalnya pengaruh pertukangan China, ini perlu penelitian lebih lanjut.

Di Negeri Rohomoni ini mungkin bisa mewakili daerah di Kepulauan Maluku yang memiliki karaktersitik budaya Islam yang paling berbeda dibanding dengan daerah lainnya. Hal ini terutama dilihat dari tradisi lokal masyarakat yang terus berlangsung hingga kini. Meskipun Rohomoni merupakan negeri Islam, namun banyak laku budaya Islam yang sangat berbeda dengan daerah lain. Kenyataannya, budaya Islam sangat kental bersentuhan dengan tradisi-tradisi lokal yang menunjukkan budaya non Islami. Dari hasil penelitian disebutkan, masyarakat Rohomoni tidak mengenal sholat 5 (lima) waktu dan Sholat jum'at. Seluruh kegiatan Sholat 5 (lima) waktu dan Jumat hanya diwakili oleh para tetua adat untuk menggantikan sholat lima waktu dan Jum'at masyarakat Rohomoni lainnya (Ambo, 2009). Dalam Aqidah Islam, tentu hal ini bertentangan, mengingat Shalat wajib hukumnya bagi setiap orang yang telah dewasa (akil baligh) dan tidak boleh diwakilkan.

Keterangan lain menjelaskan mesjid ini hanya boleh dibuka satu kali dalam seminggu yaitu khusus untuk hari jumat dan mereka yang boleh

sembahyang hanya orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang berasal dari anggota masyarakat dari kelima desa tersebut (Rohomoni, Kabauw, Kailolo, Pulauw, dan Hulaliu), sedangkan untuk masyarakat lainnya tidak dibolehkan. Keunikan yang lain adalah berupa tata cara pada saat memasuki masjid, mereka yang akan hendak sembahyang harus memakai pakaian atau seragam putih-putih dari atas sampai ke bawah, dan pada saat memasuki masjid mereka tidak boleh saling mendahului, artinya siapa yang lebih dahulu datang mereka berhak lebih dahulu memasuki masjid, tidak memandang apakah dia orang kecil atau orang tua sehingga akan tampak seperti barisan yang berjejer rapi. (Sudarmika, 2007).

Di Rohomoni terdapat pula adat proses sunatan massal yang unik, yakni adat mengasingkan si anak yang disunat selama 7 (tujuh) hari tujuh malam dalam Rumah Soa (marga). Uniknya usai pengasingan, si anak akan disucikan dengan prosesi pencelupkan kaki di pantai sebagai simbol pembersihan diri. Meskipun dalam berbagai hal menyangkut budaya Islam, sangat kental dengan dominasi budaya lokal yang terkadang menunjukkan laku budaya yang non Islami, namun beberapa hal lain menunjukkan bahwa di Rohomoni budaya Islam sangat kuat. Ini misalnya ditunjukkan oleh adanya kegiatan adat yang seluruhnya berpedoman dengan penanggalan Islam. Berbagai perayaan Umat Islam juga berlangsung seperti perayaan Maulid Nabi dan hari-hari besar lainnya. Yang menarik, masyarakat Rohomoni juga mengenal perayaan hari Fatimah yang ditujukan khusus bagi para wanita, sebagai bentuk penghormatan terhadap Siti Fatimah yang dianggap sebagai simbol wanita suci.

Dengan demikian, khusus di desa Rohomoni, berdasarkan data arkeologis tampak bahwa corak budaya Islam sangat kuat menjadi simbol eksistensi masyarakat, sementara di sisi lain laku budaya masyarakat menunjukkan dinamisnya budaya Islam yang sangat kental berbaur dengan tradisi lokal, yang pada beberapa sisi menunjukkan gambaran budaya Pra Islam.

Penutup

Budaya Islam di wilayah Maluku bagian selatan tak dapat dipungkiri banyak dipengaruhi oleh proses penyebaran Islam dari wilayah Maluku Utara, terutama Ternate dan Tidore, meskipun dari wilayah luar, kemungkinan seperti Jawa juga cukup kuat. Penjelasan ini dapat ditelusuri

baik berdasarkan data arkeologi maupun catatan sejarah. Tak dapat dipungkiri pula Islam hadir bersamaan dengan proses ekspansi kekuasaan, artinya semangat Islamisasi berbarengan pula dengan semangat pelebaran sayap kekuasaan. Dalam hal ini Ternate dan Tidore memegang peran utama. Dalam banyak kasus, data arkeologi maupun antropologis meskipun tidak secara teruji, dapat menginterpretasikan bahwa karakteristik Islam di suatu wilayah juga sangat dipengaruhi oleh proses agenda Islamisasi yang berlangsung. Agenda Islamisasi tampaknya tak bisa dilepaskan dari proses ekspansi atau perluasan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan pemegang kendali pusat pemerintahan Islam. Dimana Islam disebarkan, disitu pula perluasan kekuasaan ditanamkan. Di wilayah Maluku-Maluku Utara, eskalasi politik seperti ini lebih tajam dibandingkan daerah lain mengingat wilayah Maluku banyak berdiam kerajaan-kerajaan Islam yang besar, geografis yang relatif berdekatan dengan sumberdaya yang melimpah ruah. Hegemoni politik dan ekonomi diperebutkan untuk memperoleh pengakuan sebagai kerajaan pusat pengendali. Persaingan demi persaingan berjalan untuk mendapatkan pengakuan sebagai kerajaan yang paling berpengaruh di seluruh kepulauan Maluku.

Oleh karena kemungkinan agenda perluasan kekuasaan lebih dominan, sehingga agenda pengislaman wilayah bisa jadi sebagai agenda nomor dua atau agenda turutan. Dalam hal ini, apakah agenda Islamisasi membonceng proses ekspansi kekuasaan, berbagai perspektif bisa muncul darinya. Implikasi hal itu, kemungkinan akan ditemui karakteristik budaya Islam yang berbeda antara wilayah seberang sebagai daerah kekuasaan dengan wilayah pusat kuasa Islam. Akibat agenda Islam yang tidak benar-benar fokus, diselingi pula berbagai bentuk persaingan dalam perebutan wilayah, maka kemungkinan bisa terjadi jika penerimaan Islam di daerah penyebarannya, tidak benar-benar utuh. Inipun mungkin bisa menjadi jawaban, ketika banyak disimpulkan oleh banyak arkeolog, Islam terkadang tumpang tindih dengan tradisi lokal yang kental dengan budaya megalitik. Tampaknya, di wilayah Maluku-Maluku Utara soal persaingan dan ekspansi kekuasaan yang seiring dengan agenda Islamisasi, dipertajam lagi oleh kekuatan hegemoni Kolonial sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya budaya Islam, sekaligus menjadi pemicu atas faktor perbedaan karakteristik budaya Islam yang berlangsung.

Bagaimanapun dinamisnya budaya Islam, namun sejarah membuktikan, di wilayah Maluku, Islam menjadi faktor ikatan integrasi neger-negeri dalam satu kesatuan politis dan kultural yang sesungguhnya menjadi cikal bakal terbentuknya kerajaan sekaligus keberlanjutan pemerintahan dalam skala yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambary, Hasan Muarif, 1986 *Unsur Tradisi Pra Islam Pada Sistem Pemakaman Islam di Indonesia*. **Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV** Jakarta. Depdikbud.
-, 1991 *Makam-Makam Kesultanan dan Para Wali Penyebar Islam di Pulau Jawa*. **Aspek-Aspek Arkeologi Indonesia**. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jakarta
-, Sugeng Riyanto, Max Manuputty 1996 *Survei Arkeologi Islam di Ternate dan Tidore Provinsi Maluku*. Proyek Penelitian Purbakala Maluku.
- 1998. **Menemukan Peradaban Arkeologi dan Islam di Indonesia**. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Logos. Wacana Ilmu. Jakarta.
- Ambo, Remitha J dkk . *Adat Istiadat Negeri Robomoni*. **Karya Tulis Ilmiah**. SMA Negeri 13 Ambon.
- Djafaar, Irza Arnyta 2006 **Jejak Portugis di Maluku Utara**. Penerbit Ombak. Yogyakarta
- Handoko, Wuri 2006 *Periode Awal Kerajaan Hitu Hingga Masa Surutnya. Retrospeksi Arkeologi Sejarah*. **Kapata Arkeologi** Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2006. Balai Arkeologi Ambon
- 2007 *Peran Strategis Wilayah Kepulauan Gorom dalam Kontak Awal Budaya, Perkembangan Perdagangan dan Budaya Islam di Maluku*. **Berita Penelitian Arkeologi (BPA)** Vol. 2 Nomor 4 Tahun 2007. Balai Arkeologi Ambon

- 2008, *Penelitian Arkeologi Di Wilayah Desa Siri Sori Islam Pulau Saparua: Penelitian Terhadap Keberlanjutan Tradisi Megalitik Atas Budaya Islami. Berita Penelitian Arkeologi (BPA)* Vol. 3 Nomor 5 Tahun 2007. Balai Arkeologi Ambon
- Hitipeuw, Frans, 1984 *Kerajaan Iba Berinteraksi Dengan Segala Suku Bangsa Di Abad XVII Dalam Perjuangan Nasional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Jakarta
- Leirissa, Ricard Z. 2001. *Jalur Sutera: Integrasi Laut-Darat dan Ternate sebagai Bandar di Jalur Sutera*. Dalam M.J. Abdulrahman, et.al. **Ternate: Bandar Jalur Sutera**, LinTas (Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial). Ternate
- Lapian, Andrian B. 2001. *Ternate Sekitar Pertengahan Abad Ke-16*. Dalam M.J. Abdulrahman, et.al. **Ternate: Bandar Jalur Sutera**. LinTas (Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial). Ternate.
- Mahmud, Irfan 2001 *Determinasi Budaya Islami di Wilayah Pinggiran Kekuasaan Bugis. WalannaE. Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara*. Vol IV No 6 Juni. Balai Arkeologi Makassar.
- Marasabessy, I Rahman Abd.Drs. M.Ag *Masuknya Islam Di Ternate (Telaah Atas Pemurnian Sejarah Islam Di Ternate)*. Dalam M.J. Abdulrahman, et.al. **Ternate: Bandar Jalur Sutera**, LinTas (Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial). Ternate
- Kartodirjo, Sartono 1975 *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- Koestoro, Lucas Pertanda 1981 *"Akulturasi di Kraton Kesepuhan dan Mesjid Panjunan, Cirebon"*. **Berkala Arkeologi II**. Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Putuhena, Shaleh M. Drs 2001 *Proes perluasan Agama Islam di Maluku Utara*. Dalam M.J. Abdulrahman, et.al. **Ternate: Bandar Jalur Sutera**, LinTas (Lembaga Informasi dan Transformasi Sosial). Ternate
- Sahusilawane, 1996 **Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Islam di Kecamatan Leihitu Kab. Maluku Tengah**. Balai Arkeologi Ambon. (tidak terbit).
- Sudarmika, GM, 2007 *Penelitian Arkeologi di Desa Robomoni, Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Berita Penelitian Arkeologi (BPA)* Vol. 3 Nomor 5 Tahun 2007. Balai Arkeologi Ambon

* Penulis, Kandidat Peneliti pada Balai Arkeologi Ambon